

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	NERACA	50	05-07-2002

■ Perpanjangan KPS

# DPR Minta BP Berikan

## Data Soal Gas di Jatim

### Jakarta, NERACA

Pemerintah dan Beyond Petroleum (BP) Indonesia-Pertamina harus memberikan data yang lebih terinci mengenai kondisi *supply dan demand* gas alam di Jawa Timur sebelum DPR memberikan rekomendasi perpanjangan kontrak PSC (*Production Sharing Contract*) BP Indonesia di Blok Terang Sirasun. Rincian data tersebut penting agar wakil rakyat memperoleh masukan yang lebih komprehensif, di samping menghindari kemungkinan adanya persoalan di kemudian hari.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR Priyo Budi Santoso, secara prinsip dia menyatakan wajar rencana perpanjangan kontrak PSC tersebut sepanjang alasan perpanjangan itu memang sangat argumentatif. Misalnya bertujuan mengatasi terjadinya krisis gas di wilayah Jawa Timur. Namun tujuan tersebut jangan sampai mengalahkan kepentingan lain, yang bisa menimbulkan persoalan besar di belakang hari.

"Makanya saya meminta kepada mereka (pemerintah

dan BP-Pertamina) untuk menginformasikan mengenai kondisi riil gas di sana (Jatim). Apa betul dengan kelangkaan gas nanti misalnya akan menaikkan harga gas alam di sana. Saya kira harus diklarifikasi oleh pemerintah dan Pertamina-BP," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar sesuai mengikuti rapat tertutup dengan KPS BP Indonesia yang membahas mengenai rencana perpanjangan Blok Terang Sirasun.

Senada dengan Priyo, di tempat yang sama, anggota DPR dari fraksi yang sama, Tubagus Haryono berpendapat, sejauh ini DPR belum memperoleh secara lengkap mengenai data kuantitatif kondisi gas di Jawa Timur. Itu sebabnya, kata Tubagus, Komisi VIII DPR belum bisa memberikan persetujuan kepada BP Indonesia untuk memperpanjang kontraknya dengan pemerintah di lapangan gas Terang Sirasun, Jatim.

Menurut Tubagus, agar penilaian yang diberikan oleh DPR lebih jelas, Komisi VIII DPR sepakat menyerahkan

masalah ini ke tim yang lebih kecil, yakni sub komisi energi. Dengan demikian, katanya, selain pembahasannya akan lebih fokus, juga kemungkinan bakal terjadi sesuatu di belakang hari bisa dihindari.

"Paling tidak dengan pembahasan di tim sub komisi itu, prosesnya tidak mudah, tetapi dibahas secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sisi. Komisi VIII akan memberikan keputusan setuju atau tidak bergantung pada pengkajian sub tim kecil ini," kata Tubagus yang juga sempat menjadi karyawan di Pertamina itu.

Sebelumnya seperti diwartakan *Neraca*, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur secara prinsip mendukung pengembangan lapangan gas Terang Sirasun yang dikelola BP dalam usaha memenuhi kebutuhan gas di Jatim menyusul menurunnya kemampuan pasok gas dari lapangan gas Pagerungan, di Kangean Jatim. Oleh karena itu, Pemda Jatim akan membantu BP untuk memperoleh perpanjangan Kontrak KPS Terang

Sirasun yang akan habis tahun 2010.

Kepada wartawan sesuai melakukan kunjungan kerja ke lapangan gas Pagerungan di Surabaya beberapa waktu lalu, Wagub Jatim Imam Soepardi mengungkapkan, walaupun kewenangan keputusan perpanjangan kontrak tersebut berada di tangan pemerintah pusat c.q. Presiden RI, Pemda Jatim akan mendorong dan mendukung sepenuhnya perpanjangan tersebut.

"Bukan hanya Pemda, DPRD Jatim pun menginginkan lapangan Terang Sirasun segera dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan gas di Jatim. Lebih dari itu, jika lapangan tersebut sudah dikembangkan, dampak lanjutannya adalah terserapnya tenaga kerja di Jatim, dan bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) Jatim dari sektor migas," kata Imam waktu itu.

Menurut dia, Pemda Jatim dan pemerintah pusat, telah sepakat dalam konteks rencana pengembangan lapangan gas baru di Jatim untuk sama-sama saling memberi ke-

mudahan. Salah satu kemudahan yang bisa diberikan Pemda Jatim antara lain menjaga stabilitas keamanan terutama di sekitar wilayah operasi. Sementara kemudahan yang diberikan pemerintah pusat, menyerahkan sepenuhnya rencana pengembangan tersebut dengan melihat kebutuhan atau potensi pasar Jatim.

"Masalah ini sudah kita bicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau sangat menggantungkan masalah gas di Jatim ini kepada Pemda Jatim sendiri. Ini artinya kementerian itu betul-betul memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah gas ini. Mereka (pemerintah pusat) berjanji akan memberi kemudahan," katanya.

Seperti diketahui, produksi gas di lapangan Pagerungan yang dikelola BP saat ini menyusut di luar jadwal yang diperkirakan, yang semula sanggup menyuplai 300 juta kaki kubik/hari, turun jadi 240 juta kaki kubik/hari. (31)